

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan pertumbuhan ekonomi pada 33 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan menempatkan kredit mikro, penanaman modal asing, dan tingkat partisipasi angkatan kerja sebagai variabel independen, serta Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel moderasi. Melalui pendekatan regresi data panel yang diestimasi menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM), diperoleh sejumlah temuan yang kemudian dirumuskan dalam beberapa simpulan berikut.

- a. Kredit mikro terbukti memberikan dampak positif dan signifikan terhadap perkembangan ekonomi wilayah di 33 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan distribusi kredit mikro dapat merangsang aktivitas ekonomi masyarakat, terutama dengan memperkuat sektor usaha mikro dan kecil, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan output daerah.
- b. Investasi asing langsung (FDI) menunjukkan pengaruh yang signifikan pada taraf signifikansi 10 persen. Temuan ini menegaskan bahwa aliran modal asing tetap berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun dampaknya tidak sebesar kredit mikro. Dengan demikian, FDI

berfungsi sebagai sumber tambahan modal dan transfer teknologi, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan kondisi struktural daerah penerima investasi.

- c. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) terbukti signifikan tetapi memiliki arah pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja yang aktif belum tentu meningkatkan kinerja ekonomi apabila tidak disertai peningkatan kualitas dan produktivitas. Kondisi tersebut dapat mencerminkan adanya ketidaksesuaian keterampilan, dominasi sektor informal, atau rendahnya efisiensi tenaga kerja.
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Artinya, perbaikan pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup berkontribusi nyata terhadap peningkatan output regional. Namun demikian, hasil pengujian moderasi melalui *Moderated Regression Analysis* (MRA) menunjukkan bahwa IPM tidak mampu memperkuat maupun memperlemah hubungan antara kredit mikro, FDI, dan TPAK terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, IPM diklasifikasikan sebagai *predictor*, yaitu variabel yang memiliki pengaruh langsung terhadap variabel dependen tetapi tidak berfungsi sebagai moderator murni.
- e. Dengan memperhatikan perbandingan koefisien regresi serta tingkat signifikansi, kredit mikro adalah variabel yang paling berpengaruh

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dibandingkan dengan investasi asing dan tingkat partisipasi tenaga kerja.

B. IMPLIKASI

1. Implikasi Kebijakan Kredit Mikro

Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan perluasan akses pembiayaan mikro dengan pendekatan yang lebih terfokus pada pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki kapasitas produksi, terutama pada sektor-sektor unggulan daerah. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan dalam menyalurkan kredit berbasis klaster usaha agar distribusinya lebih terarah dan tidak bersifat acak. Di samping itu, penyaluran kredit perlu diiringi dengan pendampingan usaha secara berkesinambungan, seperti pelatihan pengelolaan keuangan serta peningkatan literasi keuangan, sehingga dana yang diperoleh benar-benar dimanfaatkan untuk aktivitas produktif dan mampu mendorong peningkatan output usaha.

2. Implikasi Kebijakan Investasi Asing Langsung

Pemerintah daerah perlu memfokuskan arah kebijakan investasi asing pada sektor-sektor yang memberikan dampak pengganda besar terhadap perekonomian daerah, khususnya sektor padat karya dan yang memiliki keterkaitan kuat dengan rantai pasok domestik. Secara teknis, upaya ini dapat dilakukan melalui pemberian insentif investasi secara selektif, penyederhanaan proses perizinan, serta

penerapan kebijakan kemitraan antara investor asing dan pelaku usaha lokal. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan pelatihan kerja perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri, sehingga tenaga kerja lokal dapat terserap secara optimal dan memperkuat efek limpahan (spillover effect) dari investasi asing.

3. Implikasi Kebijakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Upaya meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja harus diiringi dengan penciptaan kesempatan kerja yang produktif dan berkualitas. Pemerintah daerah dapat mendorong kebijakan pengembangan sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja, seperti industri manufaktur skala ringan dan UMKM berbasis potensi lokal. Selain itu, program peningkatan keterampilan tenaga kerja perlu diarahkan sesuai dengan kebutuhan pasar melalui pelatihan berbasis kompetensi serta penerapan konsep link and match dengan dunia industri. Dengan demikian, peningkatan TPAK tidak hanya mencerminkan kenaikan secara kuantitatif, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. Implikasi Kebijakan Indeks Pembangunan Manusia

Pemerintah daerah perlu menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama dalam memperkuat efektivitas berbagai kebijakan ekonomi. Dalam implementasinya, upaya

peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat difokuskan pada tiga aspek pokok, yakni pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan standar hidup yang layak.

- a. Pada aspek pendidikan, arah kebijakan sebaiknya difokuskan pada perluasan akses serta peningkatan mutu pendidikan vokasi dan pelatihan yang selaras dengan kebutuhan industri (link and match), sehingga tenaga kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan permintaan pasar. Kondisi ini akan memperbesar manfaat dari masuknya investasi asing sekaligus mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- b. Dalam aspek kesehatan, pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, mengingat kondisi kesehatan tenaga kerja berpengaruh langsung terhadap tingkat produktivitas. Oleh karena itu, penguatan fasilitas kesehatan, pengembangan layanan preventif, serta perluasan jaminan kesehatan menjadi langkah strategis yang harus dioptimalkan.
- c. Pada aspek standar hidup layak, kebijakan diarahkan pada peningkatan daya beli masyarakat melalui penguatan sektor informal dan UMKM. Dalam kerangka ini, peningkatan IPM berperan dalam memperkuat efektivitas kredit mikro, karena pelaku usaha yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang

lebih baik cenderung mampu memanfaatkan dan mengelola modal secara lebih efisien dan produktif.

C. KETERBATASAN PENELITIAN

1. Keterbatasan dalam ketersediaan serta konsistensi data sekunder antar kabupaten/kota maupun antar periode waktu berpotensi memengaruhi ketepatan analisis dalam menggambarkan dinamika jangka panjang pertumbuhan ekonomi daerah. Variasi dalam metode pencatatan data serta adanya kemungkinan keterlambatan publikasi turut menjadi hambatan dalam memperoleh data yang sepenuhnya seragam dan dapat dibandingkan secara akurat.
2. Penentuan variabel dalam penelitian ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data resmi yang dapat diakses, sehingga sejumlah variabel yang secara teoritis memiliki relevansi tetapi tidak tersedia secara lengkap dan konsisten tidak dapat diikutsertakan dalam model. Kondisi ini menyebabkan hasil analisis belum mampu merepresentasikan seluruh faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.
3. Penelitian ini belum mampu mengintegrasikan dimensi spasial dan keterkaitan antarwilayah secara mendalam karena keterbatasan data serta kompleksitas model spasial yang membutuhkan informasi tambahan, seperti data interaksi ekonomi antar daerah. Akibatnya, perbedaan karakteristik wilayah serta efek limpahan (*spillover*) antar daerah belum dapat dianalisis secara komprehensif.